



INFORMASI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(ILPPD)
KOTA CIREBON TAHUN 2014

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

ILPPD tahun 2014 Kota Cirebon kami sampaikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 tahun 2008 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cirebon, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Cirebon Tahun 2014:



1. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Wali demikianlah julukan bagi Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat. Mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi $108,33^{\circ}$ dan $6,41^{\circ}$ lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar $37,35 \text{ km}^2$ atau 3.735,82 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

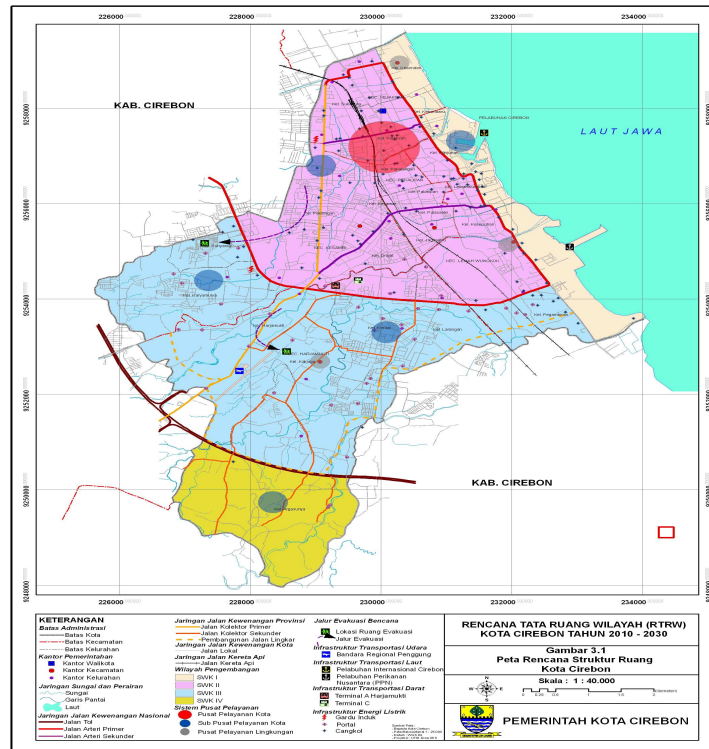
- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Topografis Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian bermula dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut :

- Kemiringan 0 - 3 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 3 - 8 % : terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 8 - 15 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti
- Kemiringan 15 - 18 % : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti



Gambar 1
Peta Kota Cirebon



Tabel 1

Jumlah Bangunan Rumah Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 2014

NO	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1	Harjamukti	21.975	
2	Kesambi	14.541	
3	Pekalipan	6.105	
4	Lemahwungkuk	9.833	
5	Kejaksan	8.899	
Total Jumlah Bangunan		61.353	

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2014 ini mencapai 384.195 jiwa yang terdiri dari 193.998 laki-laki dan 190.197 perempuan. Penduduk Kota Cirebon



dilihat dari komposisi umur, yang secara umum pada tahun 2014 ini terdiri dari kelompok penduduk berumur muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 22,5%, kelompok umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 71,4%, dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun keatas) sebesar 6%. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 30% dan kelompok umur tua belum mencapai 10%.

Tabel 2.
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Tahun 2014

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	11.414	10.523	21.937
5 – 9	16.226	15.066	31.292
10 – 14	17.224	16.166	33.390
15 – 19	17.504	16.934	34.488
20 – 24	15.947	15.401	31.348
25 – 29	15.938	15.683	31.621
30 – 34	18.435	17.358	35.793
35 – 39	17.483	16.713	34.196
40 – 44	15.079	14.450	29.529
45 – 49	12.735	12.510	25.245
50 – 54	10.034	10.511	20.545
55 – 59	8.631	9.250	17.881
60 – 64	6.922	6.768	13.690
65 – 69	4.191	4.474	8.665
70 – 74	2.923	3.447	6.370
75 +	3.312	4.893	8.205
Jumlah	193.998	190.197	384.195

Sumber: Disdukcapil 2014

Berikut ini disajikan data Jumlah Kecamatan, Kelurahan, serta Penduduk Kota Cirebon Tahun 2014 :



Tabel 3
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi
Menurut Kecamatan Kota Cirebon

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Harjamukti	17.62	5	134.124	7.614
Lemahwungkuk	6.51	4	67.081	10.214
Pekalipan	1.56	4	37.014	23.711
Kesambi	8.06	5	88.433	10.973
Kejaksan	3.62	4	57.543	15.913
Kota Cirebon	37.36	22	384.195	10.284

Sumber: Bappeda 2012

Dari lima kecamatan yang ada, Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Pekalipan (23.711 jiwa per km²) dan Kejaksan (15.913 jiwa per km²). Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Harjamukti (7.614 jiwa per km²).

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kedudukan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus lalu lintas Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum dapat mempengaruhi kondisi perekonomian ke arah perkembangan dan kemajuan.

Beberapa sektor perekonomian yang menjadi Potensi unggulan di Kota Cirebon dan memberi kontribusi penuh terhadap perekonomian secara makro terdapat pada sektor tersier, yaitu perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, serta jasa-jasa.



a.1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

a.1.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Perdagangan besar mencakup kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir kepada pedagang besar atau pedagan eceran. Perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas.

a.1.2. Hotel

Sub sektor Hotel mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah baik hotel berbintang maupun hotel tidak berbintang serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan motel

a.1.3. Restoran

Sub sektor Restoran mencakup kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi ditempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sektor ini seperti bar, kantin, warung kopi, rumah makan, warung nasi, warung sate, katering dan kegiatan sejenis lainnya.

a.2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

a.2.1. Angkutan Rel

Angkutan ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

a.2.2. Angkutan Jalan Raya

Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkut jalan raya, baik kendaraan bermotor maupun



tidak bermotor. Termasuk disini adalah kegiatan lainnya seperti sewa kendaraan (rent car) baik dengan atau tanpa pengemudi.

a.2.3. Angkutan Laut

Sub sektor Angkutan Laut mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal yang beroperasi di dalam dan di luar daerah domestik oleh perusahaan angkutan laut.

a.2.4. Angkutan Udara

Sub sektor Angkutan Udara mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah tersebut.

a.2.5. Angkutan Penyebrangan

Sub sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai, baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal Ferri.

a.2.6. Jasa Penunjang Angkutan

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa pelabuhan udara, laut, darat (terminal dan parkir), sungai, bongkar muat laut dan udara, keagenan penumpang, ekspedisi laut, jalan tol dan kegiatan lain yang sejenis.

a.2.7 Komunikasi

Sub sektor Komunikasi mencakup kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan Giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, wesel dan warkat yang diusahakan oleh PT. (Persero) Pos Indonesia serta perusahaan swasta lainnya.



Telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT. Telkom dan PT. Indosat.

Jasa penunjang telekomunikasi meliputi kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel, radio panggil dan telepon seluler).

a.3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

a.3.1. Bank

Sub sektor Bank mencakup kegiatan bank sentral dan bank komersial yang memberikan jasa keuangan kepada pihak lain misalnya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit atau pinjaman baik jangka pendek, menengah dan panjang, mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/ surat dagang/ surat hutang dan sejenisnya.

a.3.2. Lembaga Keuangan Lainnya

Sub sektor Lembaga Keuangan lainnya mencakup asuransi, dana pensiun, pegadaian, koperasi simpan pinjam dan lembaga pembiayaan. Dalam sub sektor ini juga mencakup kegiatan valuta asing, pasar modal dan jasa penunjangnya seperti pialang penjamin emisi dan lain sebagainya.

a.3.3. Sewa Bangunan

Sub sektor Bangunan mencakup kegiatan usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan, apartemen, serta usaha persewaan tanah persil.



a.3.4. Jasa Perusahaan

Sub sektor jasa perusahaan mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokasi dan kenotarian), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa pembangunan/ arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

a.4. Sektor Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa dikelompokkan ke dalam dua sub sektor, yaitu :

- 1) Sub sektor Jasa Pemerintahan Umum, dan
- 2) Sub sektor Jasa Swasta.

a.4.1. Jasa Pemerintahan Umum

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rumah tangga serta masyarakat umum. Sebagai contoh Jasa Pemerintahan Umum, Pertahanan dan Keamanan dan lain sebagainya.

a.4.2. Jasa Swasta

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang dilakukan pihak swasta, misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta perorangan dan rumah tangga, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Jasa Kemasyarakatan

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa pendidikan, kesehatan, riset/ penelitian, palang merah, panti werda, yayasan pemeliharaan anak cacat (YPAC), rumah ibadat dan sejenisnya, baik swasta maupun pemerintah.

2) Jasa Hiburan dan Rekreasi

Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa bioskop, kebun binatang, taman hiburan, pub, bar, karaoke, diskotik, kolam renang dan kegiatan hiburan lainnya.



3) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Sub sektor ini mencakup kegiatan yang pada umumnya melayani perorangan dan rumah tangga misalnya jasa reparasi, pembantu rumah tangga, tukang cukur, tukang jahit, semir sepatu dan kegiatan lainnya.

Tabel 4
PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2013 (Milyar Rupiah)

N0	Kelompok Sektor	Harga Berlaku	Harga Konstan	Keterangan
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	46,96	20,01	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	
3	Industri dan Pengolahan	3.173,00	1.749,28	
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	334,39	148,66	
5	Konstruksi/Bangunan	936,56	347,34	
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.211,90	1.893,76	
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.272,30	898,00	
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	1.546,02	552,84	
9	Jasa-jasa	1.176,98	538,44	
	Total PDRB	14.698,15	6.148,33	

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2010-2013, Bappeda Kota Cirebon

PDRB Per Sektor Kota Cirebon Tahun 2012 (Milyar Rupiah)

N0	Kelompok Sektor	Harga Berlaku	Harga Konstan	Keterangan
1	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	40,85	19,78	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	
3	Industri dan Pengolahan	2.896,28	1.661,73	
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	295,95	140,07	
5	Konstruksi/Bangunan	853,42	324,89	
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.703,24	1.817,09	
7	Pengangkutan dan	2.020,66	863,37	



	Komunikasi			
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	1.397,31	524,43	
9	Jasa-jasa	1.059,20	515,99	
	Total PDRB	13.266,90	5.867,35	

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha 2010-2013, Bappeda Kota Cirebon

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Tabel 5

Pertumbuhan PDRB Kota Cirebon Tahun 2013 (2010-2013)

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2013	48,30	20,20	9,84	3,90
2012	43,97	19,45	8,56	4,67
2011	40,51	18,58	9,90	5,03

2. Visi dan Misi Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Visi Kota Cirebon, yaitu :



“ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.

Rumusan Misi Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur Pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius
2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN.
3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum
4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
6. Peningkatan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon (RPJMD) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan pembangunan tahunan daerah, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2014, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut:

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang Religius

Strategi	Arah Kebijakan
Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur	Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kota pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS
Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan	Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.
Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan Pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota	Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.
Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama	Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan
	Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan
Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS	Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat
Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah
Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah	Meningkatkan peran Aparat Pengawasn Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya.
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD
	Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.
Peningkatan jumlah SKPD yang tertib adm inistrasi kearsipan	Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan arsip dalam bentuk digital	Menyediakan dokumen arsip secara digital
Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
	Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal
Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel	Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance
Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi	Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egovernment

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Strategi	Arah Kebijakan
Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan
Peningkatan peranserta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum
	Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling
	Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas
Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum	Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum
	Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum
Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda	Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam sosialisasi dan penerapan perda
Penilaian K-3 tingkat RW	Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat
Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas, serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang
Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Keselamatan Pelayaran	Meningkatkan keselamatan pelayaran
Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih	Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.
Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL	Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL
Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan
Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
Peningkatan mutu tenaga pendidik	Meningkatkan penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah
Pengembangan pendidikan non formal dan informal	Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW
	Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	Mengembangkan kawasan percontohan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat disemua tatanan kehidupan (Rukun Warga, Sekolah, Perkantoran, Tempat tempat Umum)
	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	Menyediakan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III
Pengendalian kelahiran	Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan
Pembinaan atlit berprestasi	Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga
Penetapan kalender budaya	Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton.
Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian
Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan)	Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM
	Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan
Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi BLK
	Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung
Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
	Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan
Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan	Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan
	Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif
Peningkatan promosi wisata	Meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif
Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan	Menyediakan satu data keluarga miskin
	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan
Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin	Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO
	Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan
	Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin
	Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah
	Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi
Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin
Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
	Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak
Penanganan PMKS	Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



Strategi	Arah Kebijakan
Penyajian data terpilah	Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatan pembangunan

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan	Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang
Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat	Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan ruang terbuka hijau public	Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani asset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH
Penyediaan data dan informasi serta instrument SDA dan LH secara berkesinambungan	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut
Penerapan instrument pengendalian dan pengawasan pencemaran, perusakan lingkungan	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi.
Pengendalian pelaksanaan konservasi SDA	Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank Sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat (3R, RW Zero Waste) dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA Kopiluhur menjadi Sanitary Landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional
Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan
Pengembangan sarana dan prasarana drainase	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
Pemeliharaan sarana prasarana drainase	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
Konservasi sumberdaya air	Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah



Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.
Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku
Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
	Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui.
Penataan lingkungan kawasan permukiman kota	Menata lingkungan permukiman dan meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan.
Pengembangan rumah sehat sederhana	Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar
	Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda

4. Urusan Desentralisasi

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga Sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.



Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Cirebon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon.

Secara Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon adalah :

Tabel. 8
Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	SKPD	Nama Singkatan SKPD	Jumlah Personil	Keterangan
A.	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No. 11/2011)			
1	Sekretariat Daerah	SETDA KOTA CIREBON	194	
2	Sekretariat DPRD	SERETARIAT DPRD KOTA CIREBON	36	
B.	Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Perda No. 13/2011)			
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL KOTA CIREBON	38	
2	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	DPPKD KOTA CIREBON	90	
3	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	DKP-3 KOTA CIREBON	62	
4	Dinas Pemuda, Olah Raga,	DISPORBUDPAR	44	

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2014



	Kebudayaan dan Pariwisata			
5	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	DISHUBINFOKOM KOTA CIREBON	197	
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	DPE-PESDM KOTA CIREBON	101	
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	DISPERINDAG-KUMKM KOTA CIREBON	49	
8	Dinas Pendidikan	DISDIK KOTA CIREBON	3057	
9	Dinas Kesehatan	DKK CIREBON	620	
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DINSOSNAKERTRAN KOTA CIREBON	48	
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	DKP KOTA CIREBON	266	
C. Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011)				
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA KOTA CIREBON	42	
2	Inspektorat	INSPEKTORAT KOTA CIREBON	44	
3	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	BK-DIKLAT KOTA CIREBON	79	
4	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	BAPUSIPDA KOTA CIREBON	39	
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	BPMPPKB KOTA CIREBON	71	
6	Kantor Ketahanan Pangan	KKP KOTA CIREBON	14	
C. Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 14/2011)				
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL KOTA CIREBON	15	
8	Kantor Lingkungan Hidup	KLH KOTA CIREBON	18	
9	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	BPMPP KOTA CIREBON	39	
10	Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati	BLU RSUD-GJ KOTA CIREBON	776	
11	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP KOTA CIREBON	77	
12	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	KPBDDPK KOTA CIREBON	27	
D. Kecamatan Dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon. (Perda No. 16/2008)				
1	Kecamatan :	KECAMATAN		Sebutan
	a. Kecamatan Harjamukti	Kec. Harjamukti	19	sesuai
	b. Kecamatan Kesambi	Kec. Kesambi	16	dengan
	c. Kecamatan Pekalipan	Kec. Pekalipan	14	nama wil-
	d. Kecamatan Lemahwungkuk	Kec. Lemahwungkuk	20	nya
	e. Kecamatan Kejaksan	Kec. Kejaksan	16	



2	Kelurahan	KELURAHAN		
	a. Kelurahan Harjamukti	Kel. Harjamukti	15	Sebutan sesuai dengan namanya
	b. Kelurahan Argasunya	Kel. Argasunya	14	
	c. Kelurahan Kecapi	Kel. Kecapi	14	
	d. Kelurahan Kalijaga	Kel. Kalijaga	11	
	e. Kelurahan Larangan	Kel. Larangan	13	
	f. Kelurahan Kesambi	Kel. Kesambi	11	
	g. Kelurahan Sunyaragi	Kel. Sunyaragi	12	
	h. Kelurahan Pekiringan	Kel. Pekiringan	13	
	i. Kelurahan Karyamulya	Kel. Karyamulya	12	
	j. Kelurahan Drajat	Kel. Drajat	12	
	k. Kelurahan Kejaksan	Kel. Kejaksan	10	
	l. Kelurahan Kebon Baru	Kel. Kbn. Baru	12	
	m. Kelurahan Kesenden	Kel. Kesenden	13	
	n. Kelurahan Sukapura	Kel. Sukapura	10	
	o. Kelurahan Pegambiran	Kel. Pegambiran	12	
	p. Kelurahan Lemahwungkuk	Kel. Lemahwungkuk	10	
	q. Kelurahan Kasepuhan	Kel. Kasepuhan	10	
	r. Kelurahan Panjunan	Kel. Panjunan	9	
	s. Kelurahan Pekalipan	Kel. Pekalipan	10	
	t. Kelurahan Jagasatru	Kel. Jagasatru	10	
	u. Kelurahan Pekalangan	Kel. Pekalangan	10	
	v. Kelurahan Pulasaren	Kel. Pulasaren	11	

2. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Urusan Wajib/Obligatory, yaitu urusan pemerintahan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar masyarakat.
2. Urusan Pilihan/Optional, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, serta potensi unggulan daerah.

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Cirebon telah menyelenggarakan Urusan Wajib/Obligatory dan Urusan Pilihan/Optional yang telah ditetapkan sebagai prioritas urusan dalam sistem desentralisasi sebagai berikut :



1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2014 dikelola oleh Dinas Pendidikan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 112.859.966.942,00 terealisasi sebesar Rp. 109.910.922.159,00 atau 97,39%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 176 (seratus tujuh puluh enam) kegiatan.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Gunung Jati. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 216.396.668.767,00 terealisasi sebesar Rp. 150.656.917.343,00 atau 69,62%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai alokasi anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 53.769.277.551,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.788.545.297,00 atau 75,86%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 20 (dua puluh) program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan.

2.2 Badan Layanan Umum RSUD Gunung Jati

RSUD Gunung Jati pada tahun anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 162.627.391.216,00 terealisasi Rp. 109.868.372.046,00 atau 67,56%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 116.395.764.099,00 realisasi sebesar Rp. 96.097.762.149,00 atau 82,56%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 16 (enam belas) program dan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan.



4. Urusan Perumahan

Urusan Perumahan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 10.864.768.650,00 terealisasi sebesar Rp. 10.371.473.721,00 atau 95,46%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

4.1. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Urusan Perumahan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.148.414.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.027.358.550,00 atau 98,03%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan.

4.2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk urusan perumahan mengelola dana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.4.716.354.600,00 realisasi sebesar Rp.4.344.115.171,00 atau 92,11% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

5. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2014 dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. Rp. 2.372.710.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.396.427.900,00 atau 58,85% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Pekalipan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan



Harjamukti dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.667.996.400,00 realisasi sebesar Rp. 6.856.869.929,00 atau 89,42%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tahun anggaran 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.550.021.300,00 realisasi sebesar Rp. 6.740.329.754,00 atau 89,28%, untuk melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan.

6.2 Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kejaksan untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.787.800,00 atau 98,59%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

6.3 Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Pekalipan untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 20.660.000,00 realisasi sebesar Rp. 20.660.000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

6.4 Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kesambi untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.955.100,00 realisasi sebesar Rp. 18.757.375,00 atau 98,96%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

6.5 Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Lemahwungkuk untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 14.940.000,00 realisasi sebesar Rp. 13.915.000,00 atau 93,14%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.



6.7 Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Harjamukti untuk urusan perencanaan pembangunan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 48.420.000,00 realisasi sebesar Rp. 48.420.000,00 atau 100%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

7 Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 22.119.960.200,00 realisasi sebesar Rp. 20.798.758.982,00 atau 94,03% untuk melaksanakan 14 (empat belas) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan.

8 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 16.746.919.088,00 terealisasi sebesar Rp. 16.155.963.688,00 atau 96,47%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

8.1 Kantor Lingkungan Hidup

Pada tahun anggaran 2014, Kantor Lingkungan Hidup untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 16.746.919.088,00 terealisasi sebesar Rp. 16.155.963.688,00 atau 96,47% yang dipergunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan.

8.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam tahun anggaran 2014, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.



13.882.264.163,00 realisasi sebesar Rp. 13.563.977.194,00 atau 87,69% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 11(sebelas) kegiatan.

9 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan ditangani oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11.091.219.800,00 realisasi sebesar Rp. 456.011.350,00 atau 4,11%. Uraian program dan kegiatan pada SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

9.1 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tahun anggaran 2014, untuk urusan pertanahan mengelola anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 456.011.350,00 atau 93,92%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

9.2 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tahun anggaran 2014, untuk urusan pertanahan mengelola anggaran sebesar Rp. 10.491.219.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

10 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.044.242.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.798.531.683,00 atau 93,92%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga



Berencana dan Kecamatan Kesambi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 518.623.500,00 realisasi sebesar Rp. 498.664.200,00 atau 96,15%. Uraian program dan kegiatan pada SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

11.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2014, untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 518.623.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.498.664.200,00 atau 96,15%. yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan.

11.2. Kecamatan Kesambi

Kecamatan Kesambi pada tahun anggaran 2014, untuk Urusan Kecamatan Kesambi mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 31.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 31.611.700,00 atau 99,96%. yang digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditangani oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.351.860.400,00 dengan realisasi sebesar anggaran sebesarRp. 1.315.197.100,00 atau 97,29%. yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan.

13 Urusan Sosial

Urusan Sosial ditangani oleh 1 (satu) SKPD yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.458.131.350,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.202.490.122,00 atau



89,60%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan.

14 Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.720.175.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.623.042.000,00 atau 94,35% yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 9 (Sembilan) kegiatan.

15 Urusan Koperasi dan Usaha kecil Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.169.721.300,00 realisasi sebesar Rp. 2.297.944.750,00 atau 72,50% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan

16 Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal ditangani Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.337.024.800,00 realisasi sebesar Rp. 4.135.902.275,00 atau 95,36% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

17 Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.535.990.300,00 realisasi sebesar Rp. 3.271.759.438,00 atau 92,53% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.



18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahragaditangani oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.806.601.500,00 realisasi sebesar Rp. 3.692.210.400,00 atau 96,99%. digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditangani oleh 2 (dua) SKPD yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.443.988.386,00 terealisasi sebesar Rp. 5.522.086.039,00 atau 85,69%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

19.1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Cirebon pada tahun anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.312.742.986,00 realisasi sebesar Rp. 1.596.828.008,00 atau 69,04% untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan.

19.2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon pada tahun 2014 mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 3.761.915.400,00 realisasi sebesar Rp. 3.602.323.031,00 atau 95,76%, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan.

19.3. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon pada tahun 2014 mengelola alokasi anggaran sebesar Rp. 369.330.000,00



realisasi sebesar Rp. 322.935.000,00 atau 87,44%, untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditangani oleh beberapa SKPD yaitu Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 101.279.313.003,00 terealisasi sebesar Rp. 85.806.676.192,00 atau 84,72%. Uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

20.1. Inspektorat

Pada tahun anggaran 2014, untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, Inspektorat Daerah Kota Cirebon mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4,461,717,500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4,237,842,677,00 atau 94,98%, untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

20.2. Sekretariat DPRD

Pada tahun anggaran 2014, Sekretariat DPRD untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.17,356,482,550,00 realisasi Rp.13,281,637,134,00 atau 76,52% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.



20.3. Sekretariat Daerah

Pada tahun anggaran 2014, Sekretariat Daerah untuk urusan Sekretariat Daerah mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 44,572,337,910,00 realisasi Rp.36,681,912,727,00 atau 82,30% untuk melaksanakan 23 (tujuh belas) program dan 111 (seratus sebelas) kegiatan.

20.4. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Kota Cirebon pada tahun anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.7,560,590,973,00 dengan realisasi sebesar Rp.6,984,284,563,00 atau 92,38% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan.

20.5. Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kejaksan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.434,311,500,00 realisasi Rp. 411,033,102,00 atau 94,64% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan.

20.6. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Pekalipan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.532,811,900,00 realisasi Rp. 468,718,810,00 atau 87,97% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

20.7. Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kesambi mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.581,319,400,00 realisasi Rp. 569,903,015,00 atau 98,04% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

20.8. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Lemahwungkuk mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.386,745,000,00 realisasi Rp. 364,438,060,00 atau 94,23% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.



20.9. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Harjamukti mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.492,715,920,00 realisasi Rp. 448,593,215,00 atau 91,05% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan.

20.10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.15.480.428.650,00 realisasi Rp. 13.895.351.800,00 atau 89,76% untuk melaksanakan 11 (sebelas) program dan 69 (enam puluh sembilan) kegiatan.

20.11. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran pada tahun anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp.4,070,438,000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3,655,564,913,00 atau 89,81% untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan.

21 Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 22,223,088,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,014,324,984,00 atau 90,61% untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun anggaran 2013 dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga



Berencana, Kecamatan dan Kelurahan Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.743.475.470,00 realisasi sebesar Rp. 9.186.705.236,00 atau 92,14%. Adapun rincian program dan kegiatan pada SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

22.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada tahun anggaran 2014, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4,175,648,100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,924,672,021,00 atau 93,99% untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan.

22.2. Kecamatan Kejaksan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kejaksan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4,175,648,100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3,924,672,021,00 atau 97,34% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan.

22.3. Kecamatan Pekalipan

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Pekalipan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 246,467,500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 239,802,500,00 atau 97,30% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan.

22.4. Kecamatan Kesambi

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Kesambi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 310,100,500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 304,491,250,00 atau 98,19% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan.



22.5. Kecamatan Lemahwungkuk

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Lemahwungkuk untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 252,115,000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 243,506,850,00 atau 96,59% untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

22.6. Kecamatan Harjamukti

Pada tahun anggaran 2014, Kecamatan Harjamukti untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 130,956,320,00 dengan realisasi sebesar Rp. 129,175,000,00 atau 98,64% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

23 Urusan Statistik

Urusan Statistik ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 323.065.000,00 terealisasi sebesar Rp. 293.500.000,00 atau 90,85%. untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan.

24 Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2014 dikelola oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.280.884.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.967.015.071,00 atau 90,43% yang digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dan Sekretariat Daerah, dengan total anggaran Rp.



3.241.988.150,00 terealisasi Rp. 2.948.114.249,00 atau 90,94%. Adapun uraian program dan kegiatan di SKPD tersebut adalah sebagai berikut :

25.1. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2.414.376.550,00 realisasi Rp.2.341.409.799,00 atau 96,68% untuk melaksanakan 7 (tujuh) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

25.2. Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Pada tahun anggaran 2014, Sekretariat Daerah untuk urusan Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 827.611.600,00 realisasi Rp. 606.704.450,00 atau 73,31% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

3. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Cirebon dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2013–2018.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 ini, dimaksudkan untuk mensinergikan program-program pembangunan di daerah dalam kerangka pelaksanaan RPJP KOTA Cirebon tahun 2005-2025, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN dalam kurun waktu lima tahun ke depan.



RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Secara umum kondisi sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada setiap SKPD cukup memenuhi kebutuhan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada beberapa SKPD terutama sarana pendukung berupa komputer.

Kekurangan tersebut dapat diatasi oleh setiap SKPD melalui pengadaan (belanja modal) dengan mengalokasikan anggaran pengadaan perangkat computer masing-masing SKPD.

5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 12. Permasalahan dan Solusi

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
I.	URUSAN WAJIB	
01.	PENDIDIKAN	
1	Masih adanya anak putus sekolah dan rawan putus sekolah	1. Peningkatan Wajar Dikdas 9 tahun dan menuju Wajar 12 tahun serta tata kelola pendidikan
2	Masih terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan	
3.	Masih ada masyarakat yang buta huruf	1. Penuntasan angka melek huruf di Kota Cirebon
02.	KESEHATAN	
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan	1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjutan 3. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan antara pemerintah , masyarakat dan stokeholder
03.	PEKERJAAN UMUM	
1	Pengembangan kawasan yang mempunyai aksesibilitas rendah	1. Pembangunan jalan baru untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan aksesibilitas kawasan 2. Pembangunan (peningkatan) ruas-ruas jalan kolektor strategis
2	Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat genangan air	1. Rehabilitasi ruas – ruas jalan yang rusak paska genangan air (hujan)
3	Masih dijumpainya kawasan-kawasan rawan tergenang banjir pada musim hujan	1. Pengendalian dan penanganan banjir pada kawasan rawan banjir

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



04.	PERUMAHAN	
1	Masih banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian	1. Perbaikan lingkungan perumahan
		2. Perbaikan perumahan kumuh
2	Kurangnya penataan dan pemanfaatan TPU	1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
		2. Pengelolaan areal TPU
05.	PENATAAN RUANG	
1	Sudah habis masa berlakunya Rencana Induk Kota (RIK) Cirebon 1986 - 2004 dan telah disusunnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2015 yang mengacu kepada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	1. Peningkatan pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap RTRW Kota Cirebon 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang turunan RTRW
2	Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penegakan hukumnya masih lemah.	1. Pengawasan dan penertiban bangunan-bangunan yang melanggar peruntukan
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dan aparat pemerintah dalam hal penataan ruang	1. Menyebarluaskan pengetahuan tentang tata ruang secara intensif
06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1	Belum optimalnya koordinasi dalam ruang lingkup bidang Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah dalam ruang lingkup Bidang Sarana dan Prasarana
2	Belum terjadinya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD lingkup bidang ekonomi, lembaga ekonomi masyarakat / lembaga keswadayaan masyarakat maupun badan –badan usaha.	1. Koordinasi lintas sektor dan lintas program/kegiatan agar dicapai pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
3	Kurangnya komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang Sosial & Budaya	1. Peningkatan komunikasi dalam pemecahan masalah-masalah lingkup Bidang Sosial & Budaya
4	Kemampuan teknis aparat perencanaan dalam penyusunan Proposal Activity Plan belum dimiliki semua sebagian besar SKPD	1. Capacity building aparat dalam penyusunan Proposal Activity Plan
5	Masih tingginya angka kematian bayi pada pelayanan kesehatan lanjutan walau terobosan RSBM telah 2 tahun berlangsung. Masih tingginya siswa rawan putus sekolah	1. Akselerasi penurunan AKB dan akselerasi WAJAR 12 tahun
6	Ancaman bencana alam dan sosial meningkat	1. Konsep penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/social
7	Masih tingginya kekerasan pada anak dan perempuan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat	1. Optimalisasi jejaring perlindungan anak dan perempuan dengan lembaga terkait Bidang Sosial Budaya
8	Ancaman bencana alam dan sosial meningkat	1. kesiapan tanggap darurat di masyarakat
9	Manajemen pusat pendidikan belum optimal	1. Optimalisasi pelayanan pendidikan formal dan non formal
10	Pemilihan Walikota Baru	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
07.	PERHUBUNGAN	
1	Menurunnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana jalan akibat meningkatnya pertumbuhan lalu lintas	1. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang didukung oleh pemanfaatan IPTEK
2	Banyaknya simpul kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara kemampuan daya dukung jalan dengan volume lalu lintas/beban kendaraan serta terbatasnya perlengkapan jalan yang terpasang	1. Pengurangan wilayah rawan kemacetan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



3	Belum optimalnya kinerja pelayanan angkutan umum	1. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum
4	Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Kota dengan Bandara, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Perikanan Kejawan.	1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Bandara, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Perikanan Kejawan
5	Masih banyaknya daerah yang belum mendapat pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1. Pemasangan dan perbaikan PJU
08.	LINGKUNGAN HIDUP	
1.	Meningkatnya kerusakan berbagai ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan konservasi terbatas dan lingkungan perairan (pantai dan estuaria).	1. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut
		2. Peningkatan kualitas lingkungan dan penataan lingkungan pada kawasan konservasi terbatas (Argasunya)
		3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya rehabilitasi/pemulihan dan konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak
2.	Menurunnya kualitas air dan udara pada kawasan kota akibat peningkatan emisi gas buang dari aktivitas industri dan kendaraan bermotor, serta berkurangnya ruang terbuka hijau dan berkurangnya resapan air tanah	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		2. Pengendalian polusi/pencemaran udara dan air
		3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan menambah ruang terbuka hijau
		4. Konservasi air tanah
3.	Kurang memadainya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mudah diakses masyarakat untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara terpadu, simultan dan sinergis	1. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
		2. Pengembangan basis data informasi lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses masyarakat.
4.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah/K3	1. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah dan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah
		2. Peningkatan kemampuan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah
5.	Belum tersedianya perencanaan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu	1. Peningkatan kualitas lingkungan melalui perencanaan lingkungan terpadu
6.	Banyaknya sarana dan prasarana persampahan yang rusak	1. Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan
09.	PERTANAHAN	
1	Masih banyaknya tanah-tanah yang diperuntukan untuk pelebaran jalan dan ruang terbuka hijau yang masih dikuasai masyarakat	1. Pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan
2	Penguasaan tanah timbul sepanjang pantai yang tidak terkendali	1. Ketertiban kepemilikan tanah timbul
		2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penertiban administrasi
10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1	Peningkatan pelayanan kependudukan	1. Pengendalian penduduk migran

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Masih banyak perempuan yang tidak berdaya	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan
13.	SOSIAL	
1	Semakin meningkatnya penyandang masalah sosial	1. Pemberantasan penyandang masalah sosial
14.	TENAGA KERJA	
1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi ternyata tidak diimbangi oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari Kota Cirebon	2. Peningkatan Kompetensi bagi pencari kerja
15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1	Peran KUKM, IKM dan sektor informasi (PKL) belum optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif 2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha UKM 4. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 5. Pelaksanaan pembinaan organisasi PKL (Korwil) dan asongan
16.	PENANAMAN MODAL	
1	Iklim investasi belum kondusif	1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
17.	KEBUDAYAAN	
1	Pelestarian budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan nilai budaya 2. Pengelolaan kekayaan budaya 3. Pengelolaan keragaman budaya 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 5. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai agama dan Budaya Daerah
22.	PEMERINTAHAN UMUM	
1.	Proses penyusunan APBD tidak sesuai dengan jadwal.	1. Penyusunan dokumen-dokumen pendukung APBD sesuai aturan
2.	Tata organisasi pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan publik	1. Optimalisasi pelayanan publik melalui tata organisasi pemerintah yang efisien dan efektif
3.	Hubungan legislatif dan eksekutif masih belum optimal	1. Peningkatan kualitas hubungan eksekutif – legislatif
4.	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan : - laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per triwulan belum optimal dilakukan seluruh SKPD (bahan laporan dari PPTK sering tidak disusun). - Intensitas penanganan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenahan kinerja SKPD dalam pelaporan. 2. Pembenahan substansi LAKIP 3. Optimalisasi kinerja SKPD yg menangani Pengaduan Masyarakat 4. Optimalisasi SKPD yang bertugas sebagai "pemberi peringatan dini".
5.	Pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan dana-dana masyarakat dan mitra kerja. 2. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah. 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
6.	Penyusunan produk hukum terutama peraturan daerah selama ini berbiaya tinggi.	1. Penyusunan produk hukum sesuai aturan.
7.	Keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah menyebabkan perlunya upaya alternatif mencari sumber pembiayaan lainnya.	1. Penyusunan dokumen rencana pembangunan yang dibiayai dari dunia usaha melalui CSR, dan alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014



21.	KEPEGAWAIAN	
1.	Pengembangan karir PNS yang belum berbasis kompetensi	1. Penerapan pola karir PNS yang berbasis kompetensi
2.	Kualitas SDM Aparatur masih kurang	1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
3.	Pelayanan administrasi kepegawaian yang belum optimal	1. Peningkatan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, aman, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan
4.	Penghargaan bagi PNS yang berprestasi masih kurang	1. Meningkatkan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
5.	Sistem pengolahan data dan informasi kepegawaian belum optimal	1. Penerapan sistem pengolahan data dan informasi secara optimal
6.	Disiplin PNS masih perlu ditingkatkan	1. Peningkatan pembinaan disiplin PNS
23.	STATISTIK	
1.	Terbatasnya data/informasi hasil pembangunan Kota Cirebon	1. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan CDA Kota Cirebon Tahun 2014
2.	Terbatasnya data/informasi untuk kebutuhan investasi	1. Pemenuhan data/informasi pembangunan Kota Cirebon melalui penyusunan Profil Daerah Kota Cirebon Tahun 2014
3.	Terbatasnya data statistik ekonomi dan indikator ekonomi Kota Cirebon	1. Pemenuhan data/informasi statistik ekonomi dan indikator ekonomi makro Kota Cirebon melalui penyusunan PDRB Kota Cirebon Tahun 2014
4.	Terbatasnya data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya	1. Pemenuhan data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan lingkup bidang sosial dan budaya
II.	URUSAN PILIHAN	
01.	PERTANIAN	
1	Ketahanan Pangan dan peningkatan Agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi program dan kegiatan kepada pelaku pertanian untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi 2. Mempertajam dan mengaktualisasikan sistem informasi kinerja outcome (pencapaian sasaran) 3. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) pertanian yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pasar (agribisnis) 4. Peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, peternakan) yang berwawasan lingkungan 5. Peningkatan efisiensi usahatani (tanaman pangan hortikultura, peternakan) yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif) 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK
04.	PARIWISATA	
1	Promosi Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pemasaran pariwisata 2. Pengembangan destinasi pariwisata 3. Pengembangan kemitraan
05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Peningkatan industri berbasis kelautan	1. Pemberdayaan masyarakat (bantuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya) kelautan yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi



		<p>pasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan efisiensi usaha perikanan (petambak dan pembudidaya ikan air tawar) serta nelayan yang memiliki daya saing (kompetitif) dan nilai tambah (komparatif). 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan kepada IPTEK dan IMTAK
06.	PERDAGANGAN	
1	Pengembangan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Peningkatan dan pengembangan ekspor 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
07.	PERINDUSTRIAN	
1	Pengembangan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 2. Pengembangan industri kecil menengah 3. Peningkatan kemampuan teknologi industri 4. Pengembangan sentra Industri potensial

6. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

A. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

1). Urusan Pertanian

Urusan pertanian ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian dengan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9,180,919,826,00 realisasi Rp. 8,761,613,899,00 atau 95,43% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.

2). Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan ditangani oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian dengan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 250,000,000,00 realisasi sebesar Rp. 246,191,000,00 atau 96,48% untuk melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan.

3). Urusan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk urusan pariwisata mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 839,990,500,00 realisasi Rp. 816,470,500,00 atau 97,20% untuk melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan.



4). **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian untuk urusan kelautan dan perikanan mengelola anggaran sebesar Belanja Langsung sebesar Rp. 4,548,921,460,00 realisasi Rp. 4,459,158,100,00 atau 98,03% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

5). **Urusan Perdagangan**

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan perdagangan mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 2,904,506,440,00 realisasi Rp. 2,611,333,822,00 atau 89,91% untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

6). **Urusan Industri**

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah untuk urusan Industri mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3,839,928,900,00 realisasi Rp. 2,733,631,275,00 atau 71,19% untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan.

7). **Urusan Ketransmigrasian**

Urusan ketransmigrasian ditangani oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun uraian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ketransmigrasian tidak terlaksana.

B. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan**

Tabel 13
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

NO	SKPD	Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Dilaksanakan	Keterangan
1	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	1. Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian, dan 3. Kehutanan	
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	



4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Industri 2. Perdagangan	
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketransmigrasian	

7. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja, adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja tersebut digambarkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yang selanjutnya diuraikan menjadi bagian-bagian sebagai Indikator Kinerja Kunci, (IKK) yaitu :

1. Aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan untuk pemerintah, dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kunci, yaitu :
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
 - c. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah
 - d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD
 - e. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - f. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
 - g. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
 - h. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah



- i. Transparansi dalam memanfaatkan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil
 - j. Intensitas, Efektivitas, Dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Pinjaman/ Obligasi Daerah
 - k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan APBD
 - l. Pengelolaan potensi daerah, dan
 - m. Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Aspek pelaksanaan kebijakan (kewenangan yang dilimpahkan ke setiap SKPD), dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kunci, yaitu :
- a. Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
 - c. Tingkat capaian spm
 - d. Penataan kelembagaan daerah
 - e. Pengelolaan kepegawaian daerah
 - f. Perencanaan pembangunan daerah
 - g. Pengelolaan keuangan daerah
 - h. Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - i. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
3. Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan, terdiri dari 26 (duapuluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu :
- 1). Urusan Wajib**
- a. Urusan Pendidikan
 - b. Urusan Kesehatan
 - c. Urusan Pekerjaan Umum
 - d. Urusan Perumahan
 - e. Urusan Penataan Ruang
 - f. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - g. Urusan Perhubungan



- h. Urusan Lingkungan Hidup
- i. Urusan Pertanahan
- j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- l. Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
- m. Urusan Sosial
- n. Urusan Ketenagakerjaan
- o. Urusan Koperasi & UKM
- p. Urusan Penanaman Modal
- q. Urusan Kebudayaan
- r. Urusan Kepemudan & Olah Raga
- s. Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri
- t. Urusan Otonomi daerah, Pemerintaha umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- v. Urusan Statistik
- w. Urusan Kearsipan
- x. Urusan Komunikasi dan Informatika
- y. Urusan Perpustakaan Daerah
- z. Urusan Ketahanan Pangan

2). Urusan Pilihan

- a. Urusan Pertanian
- b. Urusan Kehutanan
- c. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
- d. Urusan Kelautan dan Perikanan
- e. Urusan Perdagangan
- f. Urusan Industri, dan
- g. Urusan Ketrasmigrasian.



8. Tugas Pembantuan

a. Tugas Pembantuan yang diterima

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 35 ayat (1) bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah Propinsi atau Kabupaten/kota dan /atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

SKPD Kota Cirebon yang melaksanakan tugas pembantuan yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM), melaksanakan Program Bina Pembangunan Daerah yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan melalui pengesahan DIPA nomor: DIPA-033-05.5.502731/2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.145.000.000,00. Kegiatan ini digunakan sebagai anggaran pendampingan pemberdayaan sosial (p2kp/pnpm) di 22 kelurahan. Adapun anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar Rp3.145.000.000,00 (100%).
2. Dinas Kesehatan dan RSUD Gunungjati Kota Cirebon melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang digunakan untuk Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Dit.Jen Bina Gizi KIA melalui DIPA Nomor: DIPA-024-03.4.01.029494/2014 dengan anggaran sebesar Rp2.049.300.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp2.016.199.300,00 (96,38%). Kegiatan ini digunakan untuk bantuan operasional penyelenggaraan Bantuan Lokakarya mini dan penunjang capaian SPM di 22 Puskesmas, Pelaporan dan Pencatatan, Perencanaan BOK berupa konsolidasi kegiatan konsolidasi dan sinkonisasi perencanaan kegiatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan monitoring evaluasi dan pelaporan.



- b. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dari Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui DIPA Nomor: DIPA-024.04.4.025427/2014 dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dengan anggaran sebesar Rp8.271.500.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.839.777.000,00. (94,78%). Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat-alat kedokteran umum, seperti: 8 unit Infusion pump, 10 unit Syringe pump, 3 unit vacum extractor, 2 set Curretage instrument, 5 unit bed pasien, 1 unit Ventilator, 1 unit Meja operasi, 1 set Orthopedic instrumen, 4 unit CTG (Cardiotochografi), 3 unit Operating lamp, dan 10 unit Suction pump. Dana untuk administrasi kegiatan sebesar Rp40.000.000,00 diserap sebesar Rp39.891.050,00 (99,73%).
3. Dinas Kelautan Perikanan, Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon melaksanakan Program Peningkatan Prosduksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan yang digunakan untuk Kegiatan kegiatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan melalui DIPA Nomor: 018-04.4.025446/2014 dengan anggaran sebesar Rp.1.260,260.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.181.464.900 (93,74%). Kegiatan ini digunakan untuk peningkatan produksi dan mutu produksi tanaman buah, tanaman sayuran dan obat, penegembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura, dan dukungan manajemen dan teknis lainnya.

b. Tugas Pembantuan yang diberikan

Kota Cirebon secara administratif terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan, sehingga tidak memiliki unit terkecil wilayah yang dinamakan Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 bahwa tugas pembantuan dapat diberikan pula kepada pemerintah desa, maka Kota Cirebon tidak memberikan



tugas pembantuan tersebut kepada desa. Yang ada adalah tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Cirebon dari Pemerintah Pusat.

9. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2014 telah melaksanakan beberapa kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan sebagaimana tersebut di bawah ini :

➤ **Kerja sama Antar Daerah**

Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah, Pelaksanaan kerjasama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2013 telah menyelenggarakan beberapa kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama dengan pihak Ketiga, serta tugas pembantuan sebagai berikut :

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Yayasan Mercy Corps Indonesia tentang Pengembangan Kegiatan Jejaring Kota-Kota Asia Untuk Ketahanan Perubahan Iklim Nomor : 660/KB.1-BAPPEDA/2014 dan Nomor : 048/GOI/MC/II/2014.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Yayasan Mercy Corps Indonesia tentang Pengembangan Kegiatan Jejaring Kota-Kota Asia Untuk Ketahanan Perubahan Iklim Nomor : 660/Perj.2-BAPPEDA/2014 dan Nomor : 049/GOI/MC/II/2014.
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Kejaksaan Negeri Cirebon tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 119/KB.3-Huk/2014 dan Nomor : B-300/0.2.11/Gs/02/2014.
- d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Cirebon Nomor :



- 873.2/KB.10-BK.DIKLAT/2014 dan Nomor : 530/Crb-Com/PKS/ 2014 tentang Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Cirebon Nomor : 873.2/Perj.11-BK.DIKLAT/2014 dan Nomor : 531/Crb-Com/PKS/ 2014 tentang Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Cirebon Nomor : 440/KB.13-DINKES/2014 dan Nomor : 313/KTR/0814 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota Cirebon.

➤ **Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks. Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara Legislatif, Eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk :

1. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)
2. Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda)
3. Kegiatan Sapa Warga
4. Rapat Koordinasi lainnya

dengan materi bahasan antara lain :

1. Isu-isu actual yang perlu diantisipasi dan penanganan secara bersama
2. Koordinasi dalam kunjungan untuk menyambut kehadiran Pejabat Negara seperti Presiden / Wakil Presiden / Menteri.



3. Berdialog langsung dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

➤ **Pembinaan Batas Wilayah**

Sampai dengan akhir tahun 2014, pembinaan batas wilayah Kota Cirebon terfokus pada upaya penyelesaian penegasan batas wilayah antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, yang dapat dibuktikan dengan mengikuti beberapa kegiatan terakhir yaitu Penyelesaian Segmen Batas Daerah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon pada Hari Kamis Tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Ruang Bagian Tata Pemerintahan Gedung Sate Bandung sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135.4/6832/Pem.Um tanggal 3 Desember 2014 dengan kesimpulan adalah :

Sampai dengan akhir tahun 2014, pembinaan batas wilayah Kota Cirebon terfokus pada upaya penyelesaian penegasan batas wilayah antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon, yang dapat dibuktikan dengan mengikuti beberapa kegiatan terakhir yaitu Penyelesaian Segmen Batas Daerah Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon pada Hari Kamis Tanggal 4 Desember 2014 bertempat di Ruang Bagian Tata Pemerintahan Gedung Sate Bandung sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 135.4/6832/Pem.Um tanggal 3 Desember 2014 dengan kesimpulan adalah :

1. Ditjen PUM telah mengirim Draft Permendagri Batas Daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat serta Peta Lampirannya. Sebagai alternatif ke 2 pada Tanggal 27 November 2014 sebagai bahan untuk pembahasan tanggal 4 Desember 2014.



2. Terhadap alternatif ke-2 (draft ke-2 Peta Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon tersebut :
 - a. Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan pembahasan dengan Tim PBD Kota Cirebon dan sepakat terhadap alternatif ke-2 tersebut.
 - b. Pemerintah Kabupaten Cirebon tetap ingin mengacu dan sepakat terhadap alternatif ke-1 (draft ke-1 Peta Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon) dan apabila menyetujui alternatif ke-2 meminta untuk perubahan garis batas TK.07, TK.08 dan TK.09 serta TK.29 sesuai dengan permintaan Pemerintah Desa Tuk dan Pemerintah Desa Mundu Pesisir.
 - c. Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon meminta untuk memasukan 18 titik (PBU) yang telah disepakati dalam peta batas Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan rapat ke-3 untuk mengambil keputusan paling lambat 6 (enam) bulan dari rapat pertama (Tanggal 19 Nopember 2014).

➤ **Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Pada tahun anggaran 2014 dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap pra bencana dan saat bencana pada tahun 2014 dilakukan melalui program dan kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana.
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
 - Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana khususnya pada lokasi rawan bencana.
 - Meningkatkan cakupan layanan dan tanggap bencana dengan capaian akhir 60 %
2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :



- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana.
 - Bintek tanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan kepada 1000 penduduk.
3. Program perencanaan pengendalian dan penanggulangan Bencana
Program ini diaplikasikan dalam kegiatan :
- Penyusunan kebijakan / reguasi mitigasi bencana dan strategi ketahanan kota.

Antisipasi terhadap kemungkinan bencana adalah melakukan monitoring di titik-titik rawan bencana dan melakukan piket siaga bencana selama 7 x 24 jam di posko Satlak Kota Cirebon, serta terus menerus melakukan monitoring online Website BKMG.

➤ **Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban**

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa di daerah.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang direalisasikan dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa;
 - c. Sarasehan penanaman dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
 - d. Forum kerukunan umat Beragama.
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Seminar, talkshow, Diskusi peningkatan



Wawasan Kebangsaan dan Pentas Seni Budaya, Festival lomba cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan.

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
5. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan memberikan penunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Mengakhiri penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) ini, kami menyadari bahwa selama tahun anggaran 2014 terdapat beberapa program yang belum optimal. Namun demikian, dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada, kami telah dan akan terus mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi kepentingan seluruh warga Masyarakat Kota Cirebon.

Cirebon, Maret 2015

WALIKOTA CIREBON

TTD

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.